

ANALISIS IMPLIKASI KERJASAMA SISTER CITY YOGYAKARTA DAN GYEONGSANGBUK-DO DALAM PEMBENTUKAN KOTA TANGGUH MELALUI PROGRAM SAEMAUL UNDONG

Aditya Maulana Hasymi¹, Gardyas Bidari Adninda², Megan Alvira Putri³,
Diva Suci Ariani⁴

¹³Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Sosial,
Universitas Amikom Yogyakarta

²⁴Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan
Teknologi, Universitas Amikom Yogyakarta

¹adityahasymi@amikom.ac.id, ²gardyasadninda@amikom.ac.id,

³meganalvputri@students.amikom.ac.id, ⁴divasuci@students.amikom.ac.id

Abstract

One strategic approach to address the issue of changing global political configurations is foreign collaboration by cities through local governments. Through a cooperation with the South Korean city of Gyeongsangbuk-do, Yogyakarta was able to implement the sister city foreign relations, which has the ability to address regional issues. Literature reviews and in-depth interviews were used in this study to determine the effects on the community of the Saemaul Undong program's creation of resilient cities. This research aims to determine the implications of sister city between Gyeongsangbuk-do and Yogyakarta on the development of resilient cities under the Saemaul Undong program. According to the perspective of resilient cities, the implications of sister city cooperation on resilient cities is reflected in the synergy of participatory roles between the elements involved based on the institutional liberalism approach, as well as the increase in community resilience through community economic growth.

Keywords: *Sister City, Resilient City, Liberalism Institutionalism, Saemaul Undong, Diplomacy*

PENDAHULUAN

Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh aktor sub-negara yakni kota melalui pemerintah daerah dinilai sebagai langkah strategis dalam upaya menyelesaikan masalah dampak dari pergeseran konstelasi politik global. Hal tersebut dilakukan oleh kota sebagai upaya untuk menunjukkan kapasitas sebagai salah satu aktor hubungan internasional dengan memberikan pelayanan publik yang relatif memadai bagi masyarakat (Isnaeni 2013). Bentuk kerjasama luar negeri yang lazim terjadi melibatkan kota adalah sister city atau dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai kota

kembar (Szpak et al. 2022), (Morozov 2022). Sister city adalah bentuk kerjasama luar negeri dengan tujuan Pembangunan daerah yang terjalin antara pemerintah daerah dalam satu negara dengan pemerintah daerah negara yang lain (Francinni, Wibisono, and Matsunami 2022). Pada praktik sister city ini secara jelas bahwa kerjasama luar negeri kini tidak harus melibatkan pemerintahan pusat namun tetap bisa terlaksana dengan melibatkan pemerintah daerah seperti kota (Francinni, Wibisono, and Matsunami 2022). Pelaksanaan kerjasama sister city ini diatur sedemikian rupa dengan aturan formal antara dua pemerintah daerah agar saling menguntungkan. Hingga saat ini program sister city telah meningkatkan perdamaian dan solidaritas global melalui pertukaran nilai dan norma antar kota di seluruh dunia (Sinaga 2010).

Fenomena sister city dalam hubungan internasional ini terjadi bermula di Kawasan Eropa Barat pasca Perang Dunia II hingga kemudian meluas ke negara-negara lain (Zelinsky 1991). Program sister city telah dikenal secara global dan dipelajari sebagai aktivitas hubungan internasional sebagai bentuk kerjasama yang melibatkan kota sebagai pelaku utama selama lebih dari 60 tahun (Aldecoa and Keating 2013; Calder 2021; Francinni, Wibisono, and Matsunami 2022; McHugh 2015; Rodrigues and Mattioli 2017). Proses kerjasama internasional melalui skema sister city memiliki tujuan pengembangan ekonomi dan peningkatan instrument Pembangunan dalam tata kelola kota (Sitinjak, Sagala, and Rianawati 2022). Seiring perkembangan hubungan internasional menuju era globalisasi, kota sebagai aktor non-negara menyadari bahwa tujuan melaksanakan sister city adalah parameter penting bahwa pemerintah daerah telah berhasil melakukan peran mereka untuk membangun kesejahteraan masyarakat (Bontenbal and Van Lindert 2009; Das 2021; Dewi 2020; Jiang et al. 2022; Karim et al. 2024; Kurniawati 2021; Tjandradewi, Marcotullio, and Kidokoro 2006; De Villiers 2009).

Tak terkecuali bentuk kerjasama sister city ini terjadi di Indonesia secara formal oleh kota pada tahun 1992 (Maksum et al. 2020). Perkembangan kerjasama luar negeri dalam bentuk sister city di Indonesia berkembang seiring berlakunya sistem pemerintahan otonomi daerah pada

tahun 1999 (Francinni, Wibisono, and Matsunami 2022). Hal tersebut telah dilembagakan oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam SE Mendagri no 193/1652/PUOD terkait prosedur pembentukan kerjasama sister city (Sinaga 2010). Salahsatu kerjasama luar negeri dalam koridor sister city dilakukan oleh Yogyakarta yang memiliki potensi untuk menyelesaikan masalah daerah melalui kemitraan dengan kota Gyeongsangbuk-do di Korea Selatan. Kerjasama sister city antara Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do ini dimulai pada tahun 2005 dan berlanjut pada penandatanganan Letter of Intent (LoI) pada tanggal 29 Mei 2008 (Hakiem and Amalia 2021). Kerjasama kedua kota tersebut kemudian diresmikan melalui Reaffirmation of the Memorandum of Understanding pada 31 Agustus 2015 melalui Program Saemaul Undong (Hakiem and Amalia 2021). Kesamaan misi dalam Program Saemaul Undong yang berfokus pada Pembangunan kota Tangguh di Korea Selatan yang kemudian menghubungkan dengan Indonesia khususnya di kota Yogyakarta. Program Saemaul Undong sendiri telah lebih dahulu berjalan di Korea Selatan dimulai pada periode kepemimpinan Presiden Par Chung Hee pada tahun 1961-1979 dan terus berjalan hingga saat ini (Maksum et al. 2020). Program Saemaul Undong dilakukan di kota Yogyakarta dengan melibatkan desa percontohan yakni Desa Nanggulan, Kulon Progo dengan program kota tangguh yang menekankan penguatan kesejahteraan dan kemandirian Masyarakat.

Program Saemaul Undong sebagai koridor kerjasama sister city Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do menempatkan desa sebagai pelaku utama. Beberapa desa di Yogyakarta melaksanakan Program Saemaul Undong yang menekankan pada gerakan pengembangan masyarakat dengan upaya Pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini berfokus pada nilai-nilai ketekunan, swadaya, dan kemandirian (Douglass 2013). Program Saemaul Undong memiliki prinsip bermula dari masyarakat desa dan kembali ke tempat yang sama sebagai dasar fundamental (Douglass 2013). Saemaul Undong Project menggunakan pendekatan dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dengan

dukungan dari pemerintah pusat melalui tiga langkah vital yaitu: menekankan nilai percaya diri sebagai elemen penting pembangunan, mengelola lingkungan dengan fasilitas produktif bagi masyarakat, dan meningkatkan pendapatan penduduk desa melalui sektor pertanian dengan fasilitasi pelatihan agar kualitas produknya baik (Lestari 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implikasi dari kerjasama luar negeri sister city yang dilakukan pemerintah daerah terhadap upaya pembentukan kota tangguh. Program Saemaul Undong diharapkan akan menunjukkan kerjasama luar negeri sister city antara Pemerintah Provinsi Yogyakarta, Indonesia dan Pemerintah Provinsi Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan. Selain hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil dari kerjasama sister city yang bertempat di Desa Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta yang menjadi desa percontohan Program Saemaul Undong dari Korea Selatan utamanya dengan Masyarakat dan stakeholder yang bertanggung jawab atas program pembangunan kota tangguh. Lalu tujuan ketiga dari penelitian ini adalah memperluas wacana terkait penelitian kerjasama luar negeri dalam kerangka sister city yang berfokus pada partisipasi masyarakat utamanya pada pembangunan kota tangguh.

Pendekatan pemecahan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan penelitian dengan jenis campuran (mix method) dengan strategi discourse analysis dan triangulasi. Strategi discourse analysis dilakukan dengan menelaah dokumen cetak biru kerjasama sister city Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do dalam upaya pembentukan kota Tangguh melalui program Saemaul Undong. Adapun strategi triangulasi dilakukan dengan melakukan pengambilan data langsung pada tempat yang menjadi lokasi realisasi dari kerjasama sister city Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do bertempat di Desa Nanggulan, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Proses wawancara mendalam akan dilakukan untuk mengetahui dampak bagi masyarakat terkait pembentukan kota tangguh melalui program Saemaul Undong. Data diambil untuk dianalisis menggunakan perspektif teori institusional dalam hubungan internasional

serta kota tangguh dalam perspektif ilmu perencanaan wilayah dan kota. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana implikasi kerjasama sister city Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do dalam pembentukan kota tangguh dalam program Saemaul Undong?

PEMBAHASAN

Kerjasama Sister City oleh Pemerintah Daerah Yogyakarta dengan Pemerintah Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan melalui Program Saemaul Undong

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salahsatu provinsi yang terletak di Indonesia. Provinsi ini terdiri dari empat kabupaten dan satu kota: Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Provinsi Yogyakarta aktif menjalin hubungan dengan mitra luar negeri meskipun secara bentang geografis lebih kecil dari pada provinsi lain di Indonesia. Provinsi Yogyakarta menghadapi masalah yang sama dengan daerah berkembang lain di Indonesia, yakni ketersediaan layanan dasar untuk kehidupan sehari-hari bagi Masyarakat dan keterbatasan program pengembangan Masyarakat. Akibatnya, tingkat kemiskinan di Yogyakarta menyentuh angka 16,6% yang merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa (Maharani and Suryani 2023). Yogyakarta berupaya mengoptimalkan kemitraan dengan pihak asing, baik pemerintah daerah ataupun non-pemerintah, melalui kerangka kerjasama luar negeri dalam payung sister city (kota kembar) (Issundari 2024).

Aktivitas Pemerintah Daerah Yogyakarta dalam membangun kemitraan luar negeri merupakan rangkaian dari kebijakan otonomi daerah yang berlaku di Indonesia. Pemerintah daerah memiliki lebih banyak tugas dan kewenangan termasuk menjalin kerjasama dengan negara lain (Issundari 2024). Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan negara lain berdasar pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 dengan menetapkan kewenangan bahwa Pemerintah Daerah tidak hanya memiliki kesempatan untuk melakukan proses diplomasi dengan tambahan tugas pokok dan fungsi untuk berkolaborasi di sektor ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain (Amra 2023). Kesempatan Pemerintah Daerah

untuk bekerjasama dengan pihak luar lintas batas negara semakin terbuka dengan terbitnya Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No.3 tahun 2019 tentang Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri (Mardiyanto 2023). Peraturan tersebut diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri dengan tujuan untuk membuka jalan bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan jaringan internasional dengan mempertimbangkan koridor kerjasama dengan pihak yang telah memiliki hubungan diplomatik antar negara dan fokus pada kerjasama non-politik (Issundari 2024).

Upaya untuk meningkatkan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan menjalin kerjasama antara dua provinsi yaitu Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan. Kerjasama keduanya terjadi karena kesamaan sistem pemerintahan yang menjalankan unitary system dengan proses desentralisasi (Issundari 2024). Baik Pemerintah Daerah Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do masing-masing memiliki kewenangan untuk mengelola urusan daerah mereka sendiri melalui mekanisme otonomi daerah. Yogyakarta mendapat kewenangan dari Pemerintah Pusat di Indonesia untuk menjalin kerjasama internasional, serupa dengan yang terjadi di Gyeongsangbuk-do ketika kewenangan terkait pembangunan daerah juga diberi otoritas sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat di Korea Selatan (Dewi 2020). Adanya kesamaan dalam sistem pemerintahan regional antar kedua negara tersebut membuka kesempatan kemitraan sister city (kota kembar) dapat terwujud. Kedua provinsi tersebut bersepakat untuk melakukan kerjasama melalui program yang disebut sebagai Saemaul Undong.

Program Saemaul Undong berawal dari gerak langkah pemerintah pusat Korea Selatan untuk membina masyarakat agar mencapai standar hidup yang lebih baik (Han 2012). Sasaran dari program ini adalah masyarakat pedesaan yang terjerat kemiskinan agar mampu bangkit dengan memiliki mental mandiri dalam berusaha di sektor ekonomi (Choe 2005). Terdapat empat tujuan penting dari program Saemaul Undong yaitu:

meningkatkan infrastruktur produksi bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mengembangkan pola pikir masyarakat (Yi 2016). Masyarakat menjadi penyokong peting keberlangsungan program Saemaul Undong dengan berpartisipasi secara kolaboratif melalui metode bottom-up (Fitria, Hwang, and Shin 2021).

Kerjasama Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do bermula dari kunjungan utusan Perdagangan Internasional yang membawa surat pengantar dari Gubernur pada Januari tahun 2001 (Issundari 2024). Surat tersebut berisi peninjauan dari Gubernur Provinsi Gyeongsangbuk-do kepada Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang membahas inisiasi kerjasama antar kedua provinsi tersebut. Kesepakatan dicapai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding pada tahun 2005 dengan skema kerjasama luar negeri kota kembar – smart city dalam bentuk Program Saemaul Undong (Issundari 2024). Provinsi Gyeongsangbuk-do hadir secara langsung di Yogyakarta melalui pejabat daerah dan lembaga yang menaungi Program Saemaul Undong yaitu Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia. Sejak tahun 2008 Program Saemaul Undong telah berlangsung di Yogyakarta (Hakim and Amalia 2021). Program pemberdayaan ekonomi ini dilakukan dalam tiga fase hingga saat ini. Fase pertama dari Program Saemaul Undong berlangsung pada tahun 2008-2011 di Desa Ngawen Kabupaten Gunung Kidul, Desa Salam Rejo Kabupaten Kulon Progo, dan Desa Karangtalun Kabupaten Sleman. Berlanjut di fase kedua pada tahun 2015-2020 bertempat di Desa Bleberan Kabupaten Gunung Kidul, Desa Ponjong Kabupaten Gunung Kidul, dan Desa Sumbermulyo Kabupaten Bantul. Lalu di fase ketiga pada tahun 2021-2026 bertempat di Desa Nanggulan Kabupaten Kulon Progo.

Implementasi Program Saemaul Undong di Desa Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta

Program Saemaul Undong Project telah berlangsung selama tiga tahun di Desa Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai sebuah program kemasyarakatan, Saemaul Undong

dijalankan secara langsung dengan supervisi dari perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Gyeongsangbuk-do melalui perantara Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia (Ketua Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia, interview, 26 September 2024). Pelaksanaan program bermula pada tahun 2021 dan telah memasuki tahun keempat pada 2024 (Ketua Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia, interview, 26 September 2024). Kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk kerjasama sister city (kota kembar) antara Provinsi Yogyakarta, Indonesia dan Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan ini memiliki tiga program utama yang terdiri dari: program pendapatan, program pelatihan, dan program lingkungan (Ketua Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia, interview, 26 September 2024).

Pada program pendapatan yang menjadi realisasi dari kerjasama sister city Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Gyeongsangbuk-do bertempat di Desa Nanggulan terdapat dua bentuk aktivitas yaitu pembuatan kumbung jamur dan pengeringan padi. Program kumbung jamur dilakukan dengan upaya untuk membangun tempat kegiatan budidaya jamur. Proses secara keseluruhan berada dalam satu tempat yang dinamakan Gedung Saemaul Jamur Center. Perwakilan dari Provinsi Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan melalui Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia bersama dengan Masyarakat Desa Nanggulan, Kulon Progo bersinergi untuk melakukan proses budidaya jamur mulai dari menyiapkan media tanam yaitu baglog yang terbuat dari serbuk gergaji, penyuntikan bibit, pemeliharaan, hingga proses penjualan. Aktivitas kedua dari program pendapatan dilaksanakan dengan kegiatan pengeringan padi. Kerjasama antara masyarakat Desa Nanggulan dan Provinsi Gyeongsangbuk-do via Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia berupaya untuk mengeringkan padi agar hasil panen dari sawah lebih cepat dipasarkan dan terjual dengan harga tinggi. Diharapkan melalui aktivitas pengeringan padi dapat menjadi sumber pemasukan desa dengan pengelolaan berkesinambungan melalui Badan Usaha Milik Desa.

Program lingkungan yang menjadi realisasi dari kerjasama luar negeri berbasis sister city antara Pemerintah Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan di Desa Nanggulan diwujudkan dengan

usaha budidaya ikan. Pihak Gyeongsangbuk-do bersama dengan Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia mengadakan program ini setelah memetakan potensi lokal yang ada di Desa Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta sebelumnya. Budidaya ikan dinilai sesuai dengan potensi baik dari segi sumber daya manusia dan bentang geografis yang dialiri sungai besar. Pada pelaksanaan di lapangan melibatkan masyarakat dari lima Kelurahan atau Kapanewon yang ada di Desa Nanggulan yaitu Wijimulyo, Tanjungharjo, Kembang, Jati Saron, dan Banyuroto (PLT Jawatan Kemakmuran Desa Nanggulan, interview, 13 Oktober 2024). Setiap kelurahan yang terlibat dibina oleh perwakilan dari Gyeongsangbuk-do bersama Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia untuk membuat kolam ikan dengan stimulus pendanaan sebesar Rp 50.000.000 (PLT Jawatan Kemakmuran Desa Nanggulan, interview, 13 Oktober 2024). Hasil yang diharapkan dari program lingkungan ini adalah masyarakat berdaya dan mandiri secara ekonomi lewat budidaya ikan air tawar seperti lele dan gurami.

Program besar ketiga yang menjadi implementasi dari kerjasama sister city antara Provinsi Yogyakarta dengan Provinsi Gyeongsangbuk-do di Desa Nanggulan adalah program pelatihan. Aktivitas dirancang sedemikian rupa guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk pelatihan komputer dan Bahasa Korea (PLT Jawatan Kemakmuran Desa Nanggulan, interview, 13 Oktober 2024). Proses membekali masyarakat Desa Nanggulan dengan pelatihan komputer dipandang perlu dengan berkaca bahwa kemampuan teknologi informasi pada era digital seperti saat ini. Pada bulan Mei 2024 diresmikan ruang komputer beserta penyerahan di Kantor Desa Nanggulan, dimana perwakilan dari Provinsi Gyeongsangbuk-do turut hadir dalam proses peresmian PLT Jawatan Kemakmuran Desa Nanggulan, interview, 13 Oktober 2024). Hadirnya ruang komputer tersebut sekaligus mendukung program pelatihan dalam kerjasama sister city Gyeongsangbuk-do dan Yogyakarta di bidang penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan Bahasa Korea.

Untuk memastikan bahwa kerjasama luar negeri sister city antara Gyeongsangbuk-do dan Yogyakarta melalui program Saemaul Undong dapat terlaksana secara menyeluruh maka dibentuk sistem kolaborasi dengan melibatkan seluruh elemen. Adapun elemen yang terlibat agar realisasi kegiatan dapat terlaksana terdiri dari perwakilan pemerintah daerah kedua negara (Provinsi Yogyakarta, Indonesia dan Provinsi Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan), lembaga kepanjangan tangan dari Provinsi Gyeongsangbuk-do (Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia), Pejabat tempat pelaksanaan (Panewu Nanggulan dan Lurah), serta tentunya masyarakat desa Koordinator Lapangan YGSI-Nanggulan, interview, 23 September 2024). Setiap elemen yang memastikan kerjasama sister city berlangsung di Desa Nanggulan ditemukan melalui sebuah sistem yang disebut Komisi Saemaul supaya proses pendampingan dan monitoring dilakukan secara berkala Koordinator Lapangan YGSI-Nanggulan, interview, 23 September 2024). Komisi Saemaul terdiri dari struktur pengurus dan anggota Kelurahan atau Kapanewon Nanggulan. Pembagian tugas secara sistematis dibagikan mulai dari Pak Panewu bertindak sebagai pembina, Kepala BPP Nanggulan bertindak sebagai pengawas pendamping, Lurah Banyuroto bertindak sebagai ketua, Lurah Tanjungharjo bertindak sebagai bendahara, Lurah Kembang bertanggung jawab atas pengeringan padi, Lurah Wijimulyo bertanggung jawab atas Saemaul Jamur Center Nanggulan, dan Lurah Jatisarone bertanggung jawab atas budidaya ikan (Koordinator Lapangan YGSI-Nanggulan, interview, 23 September 2024). Masyarakat desa yang terlibat di setiap program pendapatan, pelatihan, dan lingkungan turut serta sebagai anggota.

Implikasi Sister City Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do melalui Program Saemaul Undong di Desa Nanggulan dalam Pembentukan Kota Tangguh

Program Saemaul Undong sebagai kerangka kerjasama sister city antara Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan memiliki dampak bagi masyarakat sebagai pelaku utama. Dampak yang dihasilkan dari skema kerjasama kota kembar tersebut dapat dilihat

menggunakan teori liberalisme institusional dalam perspektif ilmu hubungan internasional dan teori pembentukan kota tangguh dari perspektif ilmu perencanaan wilayah dan kota.

Teori liberalisme institusionalisme dalam perspektif hubungan internasional menjelaskan mengenai fenomena akan pentingnya bagi aktor hubungan internasional untuk menjalin kerjasama karena akan memberikan dampak positif berupa terwujudnya kondisi damai (Sørensen 2013). Lebih jauh, pendekatan liberalisme institusional menekankan bahwa dalam kondisi politik internasional tidak hanya negara saja yang dapat berperan, melainkan aktor lain dalam lingkup non-negara seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, individu, dan tentunya daerah atau kota (Sørensen 2013). Bentuk kerjasama kota kembar (sister city) merupakan fenomena yang merepresentasikan teori liberalisme institusionalisme yang meyakini bahwa dalam konstelasi politik global melakukan kerjasama secara terorganisir adalah langkah terbaik agar tercipta perdamaian. Institusi yang terbentuk dengan anggota yang melampaui batas negara, menurut pendekatan liberalisme institusionalisme, dapat berupa organisasi internasional yang secara formal yang mewakili negara dimana pemerintah daerah juga termasuk di dalamnya (Sørensen 2013). Pemerintah daerah memiliki otonomi untuk memajukan kota melalui berbagai macam skema termasuk kerja sama luar negeri. Proses tersebut dilakukan secara simultan dengan tetap memperhatikan tujuan pembangunan nasional dan kepentingan nasional.

Kerjasama sister city antara Pemerintah Daerah Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan melalui Program Saemaul Undong yang telah berlangsung selama tiga fase (2008-2011, 2015-2020, 2021-2026) mampu menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu melakukan kerjasama luar negeri dengan penuh tanggung jawab. Hal tersebut juga tidak terlepas dari sistem yang terintegrasi pada pelaksanaan Program Saemaul Undong. Sedari awal Program Saemaul Undong telah terorganisir secara jelas dari keterlibatan stakeholder Pemerintah Daerah Gyeongsangbuk-do pada awal program, kemudian

berlanjut dengan monitoring secara berkala dari perwakilan yang ditempatkan langsung pada desa yang dijadikan lokasi desa percontohan Saemaul Undong melalui Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia, dan diperkuat dengan melibatkan elemen masyarakat untuk berkontribusi pada realisasi program kerjasama sister city melalui Komisi Saemaul. Indikator tersebut sejalan dengan pendekatan teori liberalisme institusionalisme yang menekankan pentingnya kerjasama antar aktor hubungan internasional agar tercipta harmoni.

Pada proses berlangsungnya Program Saemaul Undong dalam kerjasama sister city antara Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do tercermin upaya untuk mewujudkan kota tangguh. Proses tersebut terlihat ketika merujuk pada konsep bagaimana sebuah kota menuju kota tangguh yakni kondisi ketahanan perkotaan terhadap keberagaman dari berbagai level mulai dari: individu, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas, hingga masyarakat global (Patel 2016). Keterlibatan berbagai elemen ditekankan agar cita-cita menuju kota tangguh dapat terealisasi. Secara lebih jauh, upaya mewujudkan kota tangguh selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa. Tertuang dalam dokumen The United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs) bahwa setiap negara anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa berupaya untuk membangun ketahanan bagi masyarakat yang berada dalam kondisi rentan dalam bentuk bahaya bencana iklim, bencana ekonomi, dan bencana sosial (United Nations 2015). Proses pelaksanaan mewujudkan kota tangguh melalui kerjasama sister city dipastikan dari hulu ke hilir dengan payung Komisi Saemaul yang terdiri dari: Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Gyeongsangbuk-do, Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia, dan pengurus dan anggota Kelurahan atau Kapanewon Nanggulan sebagai lokasi desa percontohan Program Saemaul Undong. Kesemuanya memiliki peran dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan tindak lanjut kerjasama sister city berupa program kerja di lapangan.

Program Saemaul Undong yang merupakan realisasi dari kerjasama sister city antara Pemerintah Daerah Yogyakarta dan Pemerintah Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan memiliki implikasi terhadap upaya mewujudkan kota tangguh. Hal tersebut tercermin dengan, pertama, melihat fenomena di lapangan melalui faktor ketahanan kota (key resilience city factors) dari de Boer et. al (2016) dan Patel & Nosal (2016). Adapun faktor yang mempengaruhi ketahanan kota tersebut meliputi: pendapatan ekonomi, kesetaraan sosial, sistem hukum yang adil dan terpercaya, mekanisme perlindungan sosial yang efektif, tersedianya layanan dasar untuk kehidupan sehari-hari, dan hal yang paling penting yakni kerjasama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Kedua, untuk melihat implikasi sinergi Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do dalam mewujudkan kota tangguh dapat ditinjau menggunakan dimensi kota tangguh dari Shaw (2009) yang meliputi: dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi institusional, dimensi fisik, dan dimensi natural.

KESIMPULAN

Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama luar negeri melalui skema kota kembar (sister city) untuk mewujudkan tujuan membangun kota tangguh secara strategis. Fenomena tersebut dapat tercermin dari Program Saemaul Undong yang merupakan salah satu program kerja sama antara Pemerintah Yogyakarta dan Provinsi Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan. Sinergi antara Pemerintah Daerah Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Gyeongsangbuk-do memiliki implikasi terhadap terwujudnya pembentukan kota tangguh. Bentuk implikasi terhadap upaya mewujudkan kota tangguh dapat tercermin dengan peningkatan ketahanan masyarakat melalui pertumbuhan perekonomian masyarakat berdasar pada perspektif kota tangguh dalam ilmu perencanaan wilayah dan kota serta sinergi peran partisipatif antar elemen yang terlibat dengan menggunakan pendekatan liberalisme institusional dalam ilmu hubungan internasional.

Tiga program utama dari Program Saemaul Undong yang dijalankan pada kolaborasi Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do yang terdiri dari program pendapatan, program pelatihan, dan program lingkungan memiliki dampak

bagi ketahanan masyarakat utamanya warga Desa Nanggulan yang menjadi desa percontohan. Hal tersebut ditopang dengan sistem yang disebut Komisi Saemaul dengan tujuan agar proses pendampingan dan monitoring dilakukan secara berkala. Komisi Saemaul terdiri dari struktur pengurus dan anggota masing-masing dari Pemerintah Daerah Yogyakarta, Pemerintah Daerah Gyeongsangbuk-do, lembaga kerjasama kota kembar Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesi adan Perangkat Kelurahan atau Kapanewon Nanggulan. Program Saemaul Undong ini menunjukkan kerja sama luar negeri dengan skema kota kembar tidak hanya menghasilkan kerjasama yang sifatnya hanya berhenti pada tahapan seremonial saja, melainkan memiliki implikasi langsung kepada masyarakat pada tujuan mewujudkan kota tangguh jika dilembagakan dengan baik sesuai dengan pendekatan teori liberalisme institusional dalam ilmu hubungan internasional.

Kerjasama luar negeri sister city antara Pemerintah Daerah Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan melalui Program Saemaul Undong bertempat di Desa Nanggulan sebagai desa percontohan memiliki implikasi terhadap perwujudan kota tangguh karena mencerminkan faktor ketahanan kota dan dimensi kota tangguh. Pelaksanaan budidaya jamur melalui perancangan kumbung jamur beririsan dengan faktor ketahanan kota yakni terdapatnya peningkatan ekonomi. Sinergi antar para aktor pelaksana kerjasama luar negeri sister city antara Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do melalui Komisi Saemaul dapat dilihat sebagai terwujudnya kota tangguh melalui dimensi institusional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai pemberi dana hibah penelitian BIMA 2024 ini dengan nomor kontrak: 107/E5/PG.02.00.PL/2024 sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Aldecoa F, Keating M. (2013). *Paradiplomacy in action: the foreign relations of subnational governments*. Routledge.

- Amra, M. F. (2023). KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN PREFEKTUR EHIME DALAM PENINGKATAN PRODUKSI IKAN TUNA. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 8(01), 79-108.
- Anang. (2024). Interviewed by Arianti, DS. (25 September 2024)
- Calder. (2021). *Global Political Cities: Actors and Arenas of Influence in International Affairs* [Internet]. Brookings Institution Press. Available from: <http://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctv1725qtv>
- Bontenbal M, Van Lindert P. (2009). *Transnational city-to-city cooperation: Issues arising from theory and practice*. Vol. 33, Habitat International. Elsevier; 2009. p. 131–3.
- Choe, C. S. (2005). Key factors to successful community development: the Korean experience. *IDE Discussion Paper*, 39.
- Das, S. (2021). *Disaster resilience and sustainability in South and South-East Asia: The politico-diplomatic equations of regional cooperation*. In: *Disaster Resilience and Sustainability*. Elsevier. p. 93–115.
- de Boer, J., Muggah, R., & Patel, R. (2016). *Conceptualizing city fragility and resilience*.
- Dewi, SP. (2020). *Analisis Implementasi Kerjasama Sister-Province Antara Provinsi Yogyakarta dengan Gyeongsangbuk-Do Dalam Pengembangan Desa*. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*. 2020;2(1):42–54.
- Douglass, M. (2013). *The Saemaul Undong: South Korea's rural development miracle in historical perspective* (pp. 3-34). Singapore: Asia Research Institute, National University of Singapore.
- De Villiers, JC. (2009). *Success factors and the city-to-city partnership management process—from strategy to alliance capability*. *Habitat Int.* 33(2):149–56.
- Francinni, R., Wibisono, B. H., & Matsunami, J. (2022). *An Institutional Analysis of Surabaya (Indonesia)–Kitakyushu (Japan) Green Sister City Cooperation*. In *International Conference on Indonesian Architecture and Planning* (pp. 163-177). Singapore: Springer Nature Singapore.
- Hakiem F. (2020). *Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Penguatan Keamanan Manusia (Studi Kasus Kerjasama Luar Negeri Pemprov DI Yogyakarta)*. *Dauliyah*. 5(1):49–81.
- Hakiem F, Amalia NR. (2021). *DAMPAK KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENINGKATAN KEAMANAN EKONOMI (Studi Kasus: Implementasi Program Saemaul Undong di Provinsi Yogyakarta)*. *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*. 2021;6(1):59–86.
- Han, D. H. (2012). *The successful cases of the Korea's Saemaul Undong (New community movement)*.

- Haupt W, Chelleri L, van Herk S, Zevenbergen C. (2020). *City-to-city learning within climate city networks: Definition, significance, and challenges from a global perspective*. International Journal of Urban Sustainable Development. 12(2):143–59.
- Issundari, S. (2024). Decentralised International Cooperation: Insights from the Yogyakarta (Indonesia)-Gyeongsangbukdo (South Korea) Partnership. *SINERGI: Journal of Strategic Studies & International Affairs*, 4(1), 119-135.
- Jiang F, Ma L, Broyd T, Chen W, Luo H. (2022). *Digital twin enabled sustainable urban road planning*. Sustain Cities Soc. 78:103645.
- Karim MF, Mursitama TN, Riyadi SF, Affandi RA, Muzdalifa F. (2024). *Informality, Paradiplomacy, and Cross-Border Cooperation: The Development of Tourism on Bintan Island, Indonesia*. Asian Stud Rev. 48(2):370–88.
- Kurniawati NK. (2021). *Implementasi Kebijakan Sister City Kota Bandung Dengan Kota Braunschweig (Jerman)*. JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies). 5(1).
- Lestari, I. (2016). Kerja Sama Pembangunan Korea Selatan di Vietnam dalam Pengembangan Area Pedesaan melalui Model Saemaul Undong. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 18(2), 177-201.
- Maharani, J., & Suryani, D. A. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pembangunan Kalurahan Berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 11(2), 157-168.
- Majestika, G. Interviewed by Putri, MA. (26 September 2024)
- Maksum IR, Hariyati D, Lutfi A, Holidin D. (2020). *Starting Leaps of Change from the Village: A Lesson Learned from the Saemaul Undong Movement*. Technium Soc Sci J. 10:13.
- Manfredi-Sánchez JL. (2023). *Urban Diplomacy: How Cities Will Leverage Multilateralism*. In: Hare PW, Manfredi-Sánchez JL, Weisbrode K, editors. *The Palgrave Handbook of Diplomatic Reform and Innovation* [Internet]. Cham: Springer International Publishing; p. 581–600. Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-031-10971-3_29
- Mansyur AR. (2021). *Paradiplomasi Melalui Kerjasama sister city: Sebuah Upaya Untuk Meningkatkan Potensi Industri Pariwisata Di Kabupaten Sumenep*. Public Corner 16 (1): 1–17.
- Martin LL, Simmons BA. (1998). *Theories and empirical studies of international institutions*. Int Organ. 52(4):729–57.
- McHugh JT. (2015). *Paradiplomacy, protodiplomacy and the foreign policy aspirations of Quebec and other Canadian provinces*. Canadian Foreign Policy Journal. 21(3):238–56.

- Melkunaite L, Guay F. (2016). *Resilient city: Opportunities for Cooperation*. In: IAIA16 Conference Proceedings, Resilience and Sustainability 36th Annual Conference of the International Association for Impact Assessment. p. 11–4.
- Meerow S, Newell JP, Stults M. (2016). *Defining urban resilience: A review*. *Landsc Urban Plan*. 147:38–49.
- Morozov, V. M. (2022). Network Diplomacy and City Twinning. In *Network Diplomacy: Contributing to Peace in the 21st Century* (pp. 221-231). Singapore: Springer Nature Singapore.
- Patel, R., & Nosal, L. (2016). *Defining the resilient city*. *New York: United Nations University Centre for Policy Research*.
- Putra AD, Jatmika S. (2023). *Indonesia's foreign relations through regional autonomy: Evaluation study the sister city of Medan and Penang in 2010-2022*. *Journal of Governance Innovation*. 2023;5(2):210–25.
- Rodrigues GMA, Mattioli T. (2017). *Paradiplomacy, security policies and city networks: the case of the Mercocities Citizen Security Thematic Unit*. *Contexto Internacional*. 2017;39:569–87.
- Shaw, R., & Team, I. E. D. M. (2009). Climate disaster resilience: focus on coastal urban cities in Asia. *asian Journal of environment and disaster Management*, 1(1), 101-116.
- Sinaga O. (2010). *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik: Implementasi Kerjasama Internasional*. Bandung: Lepsindo. 2010.
- Sitinjak E, Sagala S, Rianawati E. (2022). *Promoting sister city concept for sustainable and resilient cities: Indonesian cities in the face of climate change*. *Ecodevelopment*. 3(1).
- Sørensen, E. (2013). Institutionalizing interactive governance for democracy. *Critical Policy Studies*, 7(1), 72-86.
- Subagyo, T. Interviewed by Arianti, DS. (13 Oktober 2024)
- Sudirman FA, Pertiwi G, Saidin S. (2023). *Implementasi Kerjasama Sister City Kota Kendari (Indonesia)-Kota La Rochelle (Perancis) dalam Peningkatan Pelayanan Air Bersih (2017-2019)*. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 5(1):400– 16.
- Tjandradewi BI, Marcotullio PJ, Kidokoro T. (2006). *Evaluating city-to-city cooperation: a case study of the Penang and Yokohama experience*. *Habitat Int*. 30(3):357–76.
- Yangso, Y. (2016). Development state, Korea's experience of community development strategy: Focus on the Saemaul Undong development in 1970's. *International Journal of Kybernology*, 3(1), 1-18.
- Zelinsky W. (1991). The twinning of the world: sister cities in geographic and historical perspective. *Annals of the Association of American Geographers*. 81(1):1– 31.